

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS)
DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

Oleh:
Inggriani
(inkssgriani@yahoo.com)
Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli, M.si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

INGGRIANI, NIM: 1101112267. Evaluation of Implementation Aid Stimulant Innate strength Development Program (BSPS) in Dharmasraya Regency, University-level Instructure Dr.H. Zaili Rusli, M.Si

The aid stimulant innate strength housing (BSPS) is government facility, that is a number of donation that offered for society who have low salary. Meanwhile, innate strength Development is the building of housing because of initiative and society exertion with according to individual or group, include of repair, restoration or boarden, build of new house and environment.

Purpose this research to do evaluation of implementation aid innate strength Development (BSPS) in Dharmasraya regency and to know factors that influence of implementation this program.

The teory concept that used by researcher are evaluation teory and evaluation of program according Hanif Nurcholis. This research is kind of qualitative research with investigate of data according to descriptive. In the collect research data use interview technique, observation and documentation use key informant as information source.

The result of this research indicate evaluation of implementation aid innate strength Development (BSPS) in Dharmasraya regency not optimal yet. Factors that influence this implementation because minus resource, implementation, communication, dispotition and bureaucracy structure.

Keyword: evaluation of programs, aid stimulant innate strength development, evaluation teor.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik. Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi domain setiap negara berkembang. Pembangunan yang merupakan salah satu wujud nyata pemerintah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang pada tahun 2014 berganti nama menjadi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(BSPS) yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2011.

Yang dimaksud dengan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah disini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Tujuan dibuatnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BSPS). Pada tahun 2011 kabupaten Dharmasraya memperoleh bantuan rehabilitasi untuk rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui Program Bantuan Stimulan dan Perumahan Swadaya (BSPS). Yang mana berdasarkan Keputusan Pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah swadaya Wilayah Sumatera maka ditetapkanlah penerima Bantuan Stimulan dan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya.

Setidaknya hingga saat ini, di Kabupaten Dharmasraya tercatat masih terdapat 3.879 unit rumah yang tidak layak huni. Berikut data rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 1.2

Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Dharmasraya

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1 | 2011 | 4.735 |
| 2 | 2012 | 4.510 |
| 3 | 2013 | 4.271 |
| 4 | 2014 | 3.879 |

(Sumber: data olahan Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 2014)

Semenjak tahun 2011 hingga tahun 2013 tercatat sudah 410 unit rumah tidak layak huni yang telah mendapat bantuan dana stimulan perumahan swadaya dari menteri perumahan rakyat. Berikut data rekap penetapan penerima dana BSPS di Kabupaten Dharmasraya

Pada tahap pendataan masyarakat yang akan memperoleh bantuan di kabupaten dharmasraya masih terdapat tumpang tindih dalam segi pendataan atau dengan kata lain pendataan tidak dilakukan secara merata. Terbukti tidak semua masyarakat yang telah memenuhi kriteria seperti yang telah ditetapkan untuk memperoleh bantuan tapi tidak terdata oleh petugas pendataan. Padahal berada pada daerah yang sama dengan masyarakat yang memperoleh bantuan. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah dilaksanakan di Dharmasraya, padahal

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan

program ini sudah berjalan sejak tahun 2011 di kabupaten dharmasraya.

Dalam pelaksanaan BSPS di Kabupaten Dharmasraya masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah diberikan pemerintah. Pelaksanaan BSPS di Kabupaten Dharmasraya Masih terdapat masalah dalam tahapan pelaksanaannya, seperti masih terlihat adanya rumah yang tak layak huni yang belum tersentuh bantuan BSPS, padahal berada pada daerah yang sama yang mendapatkan bantuan, dan dianggap lebih layak untuk mendapatkannya. Selain itu, didalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa dana yang diberikan tidak termasuk untuk biaya upah tukang, tapi pada realisasinya masih terdapat pemotongan sejumlah dana untuk biaya upah tukang, dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan secara gotong royong dengan kelompok yang telah ditentukan tapi pada kenyataannya masih dilakukan secara sendiri – sendiri. Dan juga terdapat permasalahan dalam keterlambatan pencairan dana serta masalah-masalah lain yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu maka perlunya dilakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan stimulan swadaya di Kabupaten Dharmasraya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat memberikan penilaian serta rekomendasi untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten dharmasraya

dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Skema umum penilaian evaluasi adalah input, proses, output, dan outcome Nurcholis (2005: 146)

- a. Input yaitu masukan perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:
 - 1) Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/ prasarana)
 - 2) Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
- b. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:
 - 1) Tepat sasaran atau tidak
 - 2) Tepat guna atau tidak
 - 3) Efisien atau tidak
- c. Output (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:
 - 1) Tepat tidak sasaran yang dituju
 - 2) Berapa besar sasaran yang tercover
 - 3) Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
 - 4) Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat
- d. Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut:
 - 1) Ada atau tidak perubahan pada target/ sasaran
 - 2) Seberapa besar perubahan kelompok sasaran

- 3) Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi lain.

Edward A. Suchman dalam Jones (1996: 209) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

- Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- Analisis terhadap masalah.
- Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah (1987 : 40), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan

kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*). yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan,

Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi lain.

Langkah-langkah tersebut dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif dengan berjalan secara sistematis. Pada pelaksanaannya sendiri, evaluasi tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah atau kendala. Hal ini disebabkan evaluasi juga merupakan proses yang kompleks, sehingga kendala atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi tersebut.

Evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya *bias* serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Nugroho menjelaskan bahwasannya evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat

dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Dan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya sangat dirasakan manfaat dan dampak positifnya bagi masyarakat Dharmasraya khususnya masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut. Dimana dengan adanya program ini memberi suatu suntikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mau dan memampukan diri dalam menciptakan kondisi rumah yang layak baik secara fisik. Sosial, ekonomi dan kesehatan.

Dalam pelaksanaan program ini peran Kemenpera, Bappeda Kabupaten Dharmasraya serta Masyarakat amatlah penting. Program yang telah dibuat oleh Kemenpera disalurkan kepada Kabupaten yang masuk dalam kategori mendapat bantuan. Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan kemenpera melaksanakan Program BSPS di Kabupaten Dharmasraya dengan dibantu partisipasi oleh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Program BSPS telah dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya semenjak tahun 2011 hingga saat ini, namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Dharmasraya masih ada terdapat permasalahan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya evaluasi dengan tujuan dapat mengukur dan menilai sejauh mana permasalahan yang terjadi untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai langkah dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi dengan menggunakan teori Nurcholis dengan hasil sebagai berikut:

1. Input

Input yaitu masukan yang perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Dengan indikator penilaian:

a. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/ prasarana)

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah program yang dibentuk, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sumber yang mana sumber tersebut akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya. Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan, jika personil yang melaksanakannya kurang mempunyai sumber-sumber untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengetahui keberadaan berbagai sumber-sumber yang terkait dengan pelaksanaan program BSPS di kabupaten Dharmasraya. Sumber daya yang dimaksud dapat berwujud sumber daya manusia, uang, sara/ prasarana. Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dalam pelaksanaan program BSPS di kabupaten dharmasraya terhambat salah satunya dikarenakan sumber daya manusia yang ada tidak memadai.

“pelaksanaan program BSPs disini sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya, masyarakat yang memperoleh bantuan harus melaksanakan perbaikan rumahnya dengan bergotong-royong. Namun kenyataannya sebagian besar dari masyarakat yang mendapat bantuan tidak mempunyai keahlian dalam membangun rumah (wawancara dengan

Kassubid.Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasray, 6 januari 2015)

Peran masyarakat sangat besar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Program BSPS, yang mana dalam hal pembangunan rumah dilakukan oleh masyarakat sendiri secara bergotong royong dengan kelompok sesama penerima bantuan. Tapi pada kenyataannya, dalam pelaksanaannya di kabupaten dharmasraya masyarakat yang mendapat bantuan sebagian besar tidak mempunyai keahlian dalam melakukan pembangunan rumah.

Dari wawancara peneliti dengan salah seorang warga diketahui tentang bagaimana cara pembangunannya:

Wawancara dengan masyarakat yang memperoleh bantuan BSPS:

“Dalam hal pembangunan, kami yang tidak mempunyai keahlian dalam bertukang akan dipotong uang bantuan yang diterima sebanyak Rp.500.000,00 sebagai upah tukang”. (wawancara dengan salah satu masyarakat yang memperoleh bantuan, 5 januari 2014)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dana bantuan yang diterima sebanyak Rp. 7.500.000,00 akan dipotong lagi sebanyak Rp. 500.000,00 untuk upah tukang yang tentunya akan mengurangi untuk anggaran dalam membeli bahan bangunan, sehingga pembangunan tidak dapat tercapai dengan yang telah direncanakan.

Dana Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang pada dasarnya adalah sebagai dana suntikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan pembangunan, bagi masyarakat Dharmasraya tidak diterima sebagai demikian. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa bantuan ini adalah bantuan bedah rumah sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat sangat ketergantungan dengan dana yang

diebrikan tanpa ada inisiatif lain untuk lebih meningkatkan kualitas rumahnya.

“Masyarakat kita menyebut bantuan ini sebagai bedah rumah, di mana kebanyakan dari mereka banyak yang melakukan protes tentang bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk meningkatkan kualitas rumahnya karena tidak memiliki inisiatif lain selain dana yang diperoleh. Sehingga banyak rumah yang telah direnovasi dengan dana BPS tidak terlalu banyak terdapat perubahannya. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015)

Pada dasarnya bantuan BPS ditujukan sebagai suntikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu berdayaguna untuk meningkatkan kualitas rumahnya, tapi pada kenyataannya sebagian besar masyarakat dharmasraya yang memperoleh bantuan BPS tidak mampu melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

b. Bahan-bahan dasar pendukung

Dalam penyaluran dana bantuan BPS, dana dicairkan dalam bentuk bahan bangunan yang di ambil di toko bangunan yang telah ditunjuk di Kabupaten yang memperoleh bantuan. Disinilah terdapat kendala dalam hal bangunan, sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pegawai Bappeda.

“ Salah satu kendala yang ada dalam pelaksanaan program ini adalah tentang harga bahan bangunan yang tentunya berbeda-beda di setiap daerah, yang menjadikan bahan bangunan yang diperoleh di daerah satu akan berbeda dengan daerah yang lainnya. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bahan bangunan yang

diperoleh masyarakat dari hasil bantuan BPS di daerah satu dengan yang lainnya akan berbeda karena harga bahan bangunan yang terdapat perbedaan di setiap daerah. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil pembangunan yang diperoleh.

2. Proses

Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan indikator:

a. Pelaksanaan program bps tepat sasaran atau tidak

Apakah program yang telah dilaksanakan tepat sasaran atau tidak akan menentukan keberhasilan dari suatu program yang di laksanakan. Seperti yang ditentukan didalam peraturan bahwa sasaran dari program bantuan stimulan perumahan swadaya (BPS) ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan bantuan meningkatkan kualitas rumahnya.

Pelaksanaan program BPS di Kabupaten dharmasraya dinilai masih kurang tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang dinilai memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan tetapi tidak mendapat bantuan.

Wawancara dengan masyarakat yang tidak memperoleh bantuan:

“Penyaluran bantuan BPS di Dharmasraya sudah tepat sasaran, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang protes karena tidak mendapat bantuan. Hal ini dikarenakan jumlah bantuan yang diperoleh dari kementerian terbatas”. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015)

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui masih terdapat kurang tepat sasaran dalam penyaluran bantuan, dikarenakan banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dinilai layak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkannya.

b. Pelaksanaan program BSPS tepat guna atau tidak

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan suatu langkah pemerintah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar berdayaguna dalam meningkatkan kualitas ruamahnya. Tepat guna atau tidaknya program ini dapat dilihat dari masyarakat yang melaksanakan program tersebut.

“Masyarakat Dharmasraya banyak yang tidak bisa memanfaatkan bantuan ini dengan baik. Makanya pembangunan yang dilakukan banyak yang tidak memuaskan”. (wawancara dengan **Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015**)

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lihat dilapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan program ini di Dharmasraya masih belum bisa dikatakan tepat guna.

c. Pelaksanaan program BSPS efisien atau tidak

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dapat dikatakan efisien atau tidaknya dilihat dari proses pelaksanaannya, apakah proses pelaksanaan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

Dalam pelaksanaan program ini, masih terdapat berbagai kendala. Seperti kutipan wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat yang memperoleh bantuan berikut ini:

“Dalam tahap pecairan dana ke II diperlukan waktu yang cukup lama, ini menyebabkan pembangunan yang dilakukan menjadi terbengkalai”. (wawancara dengan **masyarakat yang memperoleh bantuan, 5 Januari 2015**)

“Memang banyak keluhan masyarakat tentang keterlambatan pencairan dana, namun keterlambatan itupun terjadi karena hasil dari mereka sendiri karena terlalu lama dalam proses menyelesaikan pembangunan tahap I. Dimana pencairan dana tahap ke II baru bisa dilakukan setelah menerima hasil laporan dari pembangunan tahap I”. (wawancara dengan **Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015**)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Dharmasraya belum bisa dikatakan efisien, karena berbagai masalah yang terjadi menghambat dalam proses pelaksanaan sehingga memerlukan waktu yang lama tidak seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Output

Output (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil-hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini telah ada melalui hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Dharmasraya. Untuk mengetahuinya maka dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:

a. Tepat tidaknya sasaran pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dituju

Tepat atau tidaknya suatu sasaran kegiatan sangat tergantung pada proses pelaksanaan kegiatan tersebut dan hasil yang diharapkan dari program yang telah ditentukan. Dari hasil yang diperoleh dari penelitian di Kabupaten Dharmasraya ini sudah diketahui bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dharmasraya menurut saya sudah tepat, karena program ini sangat dibutuhkan masyarakat yang tidak mampu dalam hal keuangan”. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Dharmasraya dinilai sudah tepat.

b. Berapa besar sasaran pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tercover

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian di Kabupaten Dharmasraya ini seberapa besarnya sasaran dari pelaksanaan program ini sudah tercover atau tergambar bahwa pelaksanaan program ini masih ada kendala atau masih belum berjalan dengan lancar.

“Pelaksanaan Program BSPS memiliki konsep tuntas desa/ kelurahan, tuntas Kecamatan, tuntas Kabupaten yang mana dalam hal ini di Kabupaten Dharmasraya hanya 3 dari 11 kecamatan yang ada di Dharmasraya yang tersentuh bantuan BSPS ini. Menyebabkan banyak protes dari warga”. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa masih banyaknya rumah

yang tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya yang belum mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

4. Outcomes

Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan.

Untuk itu dikembangkan instrument dengan indikatornya:

a. Ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Disini dijelaskan ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran dari pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya harus sesuai dengan yang diharapkan. Namun disini target/sasaran itu harus benar-benar berjalan tanpa ada hambatan, disini pelaksana harus bertanggung jawab dengan tugas yang harus diselesaikan tanpa adanya pengaruh-pengaruh yang tidak diharapkan.

Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan:

“Saya merasa sudah ada perubahan terhadap rumah ini setelah mendapat bantuan dari pemerintah. Hanya saja mungkin agak kurang”. (wawancara dengan masyarakat penerima bantuan, 5 Januari 2015)

b. Seberapa besar perubahan kelompok pada sasaran pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Dari hasil penelitian, seberapa besar perubahan terhadap sasaran yang dituju dapat terlihat dari hasil bantuan perbaikan rumah yang sudah dilaksanakan. Dari sini tampak bahwa tidak terdapatnya perubahan yang cukup besar terhadap hasil dari pelaksanaan pembangunannya.

“Masyarakat yang mendapat bantuan hanya mengharapkan dari bantuan yang diberikan tanpa ada inisiatif lebih untuk meningkatkan kualitas perbaikan. Disinilah tujuan dari program ini tidak tercapai”. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015)

c. Seberapa banyak kelompok sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tertangani

Dari hasil yang diperoleh tentang berapa banyak kelompok sasaran yang tertangani dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni yang sudah mendapat bantuan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

“Mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2013 setidaknya sudah 856 unit rumah yang telah mendapat bantuan dari program BSPS, diharapkan kedepannya semakin banyak lagi sehingga dapat mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya”. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015)

“Kami berharap kami yang belum mendapatkan bantuan tersebut untuk bantuan selanjutnya dapat memperolehnya. Karena kami sangat berharap pemerintah dapat membantu kami dalam memperbaiki kondisi rumah yang seperti ini”. (wawancara dengan masyarakat yang tidak memperoleh bantuan, 5 Januari 2015)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sudah cukup banyak kelompok sasaran yang tersentuh oleh bantuan ini, namun masih ada sebagian yang berada dalam daerah yang sama yang memenuhi syarat dan kriteria tetapi belum

mendapatkan bantuan bahkan ada yang tidak didata oleh petugas.

d. Seberapa banyak kelompok sasaran yang terlibat

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa kelompok sasaran yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih terbatas dalam 3 kecamatan.

“Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ini masih terbatas 3 kecamatan yang ada di Dharmasraya dikarenakan program BSPS yang memakai konsep Tuntas”. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 6 Januari 2015)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa masih kurangnya kelompok sasaran yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Dharmasraya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Dharmasraya

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Dharmasraya peneliti menggunakan teori Edwar III. Edwar III mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, meliputi indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Rosady ruslan (2005: 79) proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan (*message*) dari pengirim pesan (*komunikator*) kepada penerima

(komunikasikan), dengan catatan bahwa proses tersebut bertujuan tercapainya saling pengertian (*mutual understanding*) di antara kedua belah pihak. Sebelum pesan-pesan itu dikirim kepada komunikan, komunikator memberikan makna-makna dalam pesan tersebut (*decode*) yang kemudian ditangkap komunikan dan diberikan makna sesuai dengan konsep yang dimilikinya (*encode*). Tujuan komunikasi adalah memberikan keterangan tentang sesuatu kepada penerima, mempengaruhi sikap penerima, memberikan dukungan psikologis kepada penerima atau mempengaruhi perilaku penerima.

Jadi, komunikasi merupakan pengiriman atau penyampaian perintah-perintah atau arahan-arahan atau informasi yang bertujuan menghasilkan dampak.

Peran komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat: persuasif, educatif dan informatif. Proses penyampaian informasi/pesan pada umumnya berlangsung dengan melalui suatu media komunikasi, khususnya bahasa percakapan yang mengandung makna yang dapat dimengerti atau dalam lambang yang sama.

“Petugas pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Dharmasraya telah menginformasikan tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan cara mendata masyarakat yang memenuhi kriteria mendapatkan bantuan dan menjelaskan tentang program tersebut”. (wawancara dengan Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 7 Januari 2015)

“saya tidak mengetahui tentang program itu, dan tidak pernah ada petugas yang datang mendata kerumah saya”. (wawancara dengan masyarakat Dharmasraya, 5 Januari 2015)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan informasi bahwa komunikasi tentang program BSPS di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar masyarakatnya tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa informasi tentang program tersebut tidak tersampaikan secara merata oleh petugas pelaksana. Sehingga hanya sebagian kecil yang mengetahui.

Diketahui bahwa komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Dharmasraya. Kurang meratanya komunikasi yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang layak mendapat bantuan tetapi belum mendapatkan bantuan.

Dalam pelaksanaan program seharusnya diperlukan komunikasi yang baik antara petugas pelaksana program dan masyarakat sehingga terjalin kerjasama yang baik.

2. Sumber daya

Walaupun tujuan isi dari kebijakan itu sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam pelaksanaan kurangnya sumber daya, maka pelaksanaan tidak dapat berjalan dengan efektif. sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang mendukung proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Dharmasraya. Dimana dibutuhkan keterampilan dari masyarakat selaku pemanfaat program. Dimana tujuan program BSPS adalah Memberdayakan masyarakat yang menuntut masyarakat tidak hanya menerima tetapi juga berusaha dalam pelaksanaannya.

“Dalam pelaksanaan program ini peran masyarakat cukup besar, karena program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri harus melakukan usaha untuk memperbaiki rumahnya. Disini masyarakat diberi bantuan dalam bentuk bahan bangunan yang kemudian masyarakat tersebut harus mengerjakan pembangunan rumahnya sendiri”. (wawancara dengan **Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 7 Januari 2015**)

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam hal pelaksanaan pembangunan masyarakat diharuskan dapat memperbaiki rumah dengan usahanya. Yang mana bantuan yang diberikan hanya untuk bahan bangunan tidak termasuk upah tukang, disniilah dituntut usaha masyarakat itu sendiri. Tapi yang terjadi di lapangan, sebagian besar dari masyarakat yang memperoleh bantuan tidak mempunyai kemampuan bertukang, sehingga petugas memberlakukan pemotongan dana bantuan untuk biaya tukang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan otomatis akan mengurangi peningkatan kualitas rumah serta akan berpengaruh terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Dharmasraya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologi untuk melaksanakan kebijakan. Sub indikatornya adalah:

- a. Adanya pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan
- b. Adanya arah respon para pelaksana untuk menerima atau menolak melaksanakan kebijakan
- c. Adanya insentif atau ransangan atasan kepada pelaksana program

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakn, maka proses implemantasi kebijakan juga tidak akan efektif.

“Sebagai pelaksana harus memahami program bantuan stimulan perumahan swadaya, jadinya dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar”. (wawancara dengan **Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 7 Januari 2015**)

“Menurut saya dalam menjalankan program ini mengalami kesulitan dalam sosialisasi terhadap masyarakat. Sangat susah untuk menjelaskan tentang bantuan stimulan. Karena dalam persepsi masyarakat tertanam bahwa bantuan ini merupakan untuk bedah rumah”. (wanwawancara dengan **staff Bapedda, 7 Januari 2015**)

Dari wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat tentang bantuan ini adalah bantuan bedah rumah yang memberikan bantuan renovasi seluruh rumah, sehingga pada saat pencairan bantuan masyarakat kecewa karena bantuan yang didapatkan tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Sehingga tidak banyak terdapat perubahan dalam perbaikan rumah yang menyebabkan masyarakat meminta lebih kepada pemerintah.

4. Stuktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka

miliki dalam menjalankan kebijakan. Sub indikatornya adalah:

- a. Adanya prosedur pengorganisasian standar (SOP) yang dapat membantu organisasi / lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Adanya pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedur atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implemtator dalam bertindak.

“Dalam pelaksanaan program bantuan dana stimulan perumahan swadaya memiliki aturan yang telah ditentukan, namun dalam pelaksanaan dilapangan masih terdapat melenceng dari aturan karena keadaan yang terjadi di lapangan”. (wawancara dengan **Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 7 Januari 2015**)

Dalam peraturan diharuskan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat yang mendapat bantuan, tapi yang terjadi dilapangan harus sedikit melenceng dari peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam hal koordinasi antara petugas dari Kemenpera dengan petugas Bappedda sangat dirasakan kurang oleh pihak

bappedda, sperti yang disampaikan oleh petugas Bappedda dalam wawancara berikut ini:

“Kendala lain dalam pelaksanaan program ini adalah petugas kemenpera yang ada dilokasi kurang koordinasi dengan pihak kabupaten”. (wawancara dengan **Kassubid. Perumahan, pemukiman, & SDA Bappeda Kabupaten Dharmasraya, 7 Januari 2015**)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil peneltian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kabupaten dharmasraya, maka diperoleh bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan optimal hal ini disebabkan karena:

1. Sumberdaya pendukung untuk pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya kurang memadai, khususnya sumber daya manusianya, dan koordinasi antara masyarakat, Bappedda serta Kemenpera belum berjalan seperti yang diharapkan.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya, diantaranya:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi (kecenderungan sikap)
 - d. Struktur biroksi